

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara dan dapat di paksakan pada yang wajib membayarnya berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan penyelenggaraan pemerintah di dalam negara. Pajak memiliki suatu fungsi antara lain sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran dari pajak merupakan sumber dan yang difungsikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, salah satunya penyediaan barang dan jasa publik serta pembangunan struktur manapun infrastruktur. Fungsi kedua adalah pengatur yang memiliki arti bahwa pajak tersebut sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi, yang di maksud mengatur adalah memberikan batasan-batasan agar tujuan yang ingin dicapai tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Selain itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapat optimal.

Apabila membahas dengan pengertian pajak, banyak referensi yang memberikan batasan tentang pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dalam perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *with holding system*, dimana sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga seperti pajak pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Jadi, semakin patuh

wajib pajak melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak akan meningkat.

Permasalahan yang terjadi terhadap pajak penghasilan pasal 23 adalah adanya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pembayaran pajak penghasilan 23 atas jasa dan sering wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari jasa tidak atau belum melaporkan Surat Pemberitahuan Masa. Sehingga kepatuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 23 menurun.

Oleh karena itu diperlukan adanya strategi dalam penerimaan pajak, dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak berdampak pada peningkatan penerimaan pajak kantor pelayanan pajak yang dibayarkan wajib pajak masuk dalam kas negara. Dengan harapan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun sesuai dengan target penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis mencoba mengamati masalah tersebut dan menuliskannya dengan judul : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Di kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo”

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu ditetapkan tujuan studi lapang. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini berupa tujuan yang telah dikategorikan kedalam tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

## 1. Tujuan Umum

Penulisan Tugas akhir ini dimaksud untuk :

- a. Untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.
- b. Untuk mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan sehubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

## 2. Tujuan Khusus

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd) Program Diploma III Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) surabaya.

### 1.3 Manfaat Studi Lapangan

Manfaat yang dihaapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diterapkan oleh kantor pelayanan pajak, juga dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) surabaya.
- b. Mengembangkan kemampuan agar lebih memahami masalah dalam bidang perpajakan.

- c. Untuk bahan diskusi dan masukan untuk menerapkan sistem perpajakan yang baik, benar dan sesuai peraturan undang-undang perpajakan untuk kedepannya.

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Pembahasan masalah ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan dalam menginterpretasikan laporan tugas akhir ini agar arah pembahasan tidak mengalami kesimpangsiuran dan pembahasan yang terlalu luas, maka penulis mengambil data tentang penghasilan pasal 23 atas jasa di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Mulyorejo pada tahun 2014,2015,2016.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Penulisan laporan tugas akhir ini diperlukan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

##### **1. Observasi**

Cara pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap masalah yang diteliti,dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh secara kenyataan dan mempunyai hubungan dengan masalah penelitian, dengan datang langsung ke lapangan, tempat Tugas Akhir dalam hal ini pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO.

## 2. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan cara mengambil arsip atau dokumen yang terdapat di kantor pelayanan pajak yang ada pembahasan dalam penelitian. Dokumen berguna untuk mengetahui informasi tentang data-data yang akan di pakai sebagai bukti dalam penelitian.

## 3. *Interview*

Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten memberikan data yang menjadi penelitian. Metode ini sangat berguna karena informasi yang dapat, cepat, dan langsung dari responden serta dapat memperoleh keterangan yang kadang bersifat rahasia.

### **1.6 Jadwal Studi Lapang**

Agar mampu menyelesaikan studi lapang sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka penulis perlu melakukan penetapan waktu penyusunan studi lapang. Jadwal studi lapang pada studi lapang ini dimulai pada tanggal 1 Desember hingga 30 Desember 2017.